



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.526732/2025**



DS:1100-1840-9931-8128

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 02**

Tanggal : 23 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
  3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
  4. Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Sebesar : Rp. 15.896.553.000 ( LIMA BELAS MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.896.553.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 15.896.553.000

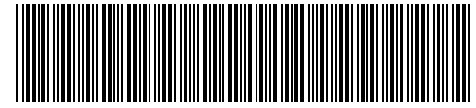
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025**



DS:1100-1840-9931-8128

Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

---

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	15.896.553.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	139.690.000
WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	15.756.863.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1100-1840-9931-8128

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : I A. 1

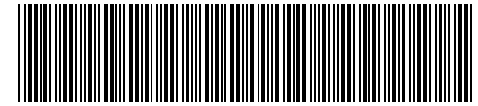
Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			15.896.553.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			139.690.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11,00	Unit, m2, Paket	139.690.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	11.00	Unit	139.690.000
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			15.756.863.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	15.756.563.000
Rincian Output	:	01	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Laporan	700.000
	:	02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	15.755.863.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	300.000
Rincian Output	:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	300.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Sugiyanto, S.H., M.H  
NIP. 196711241992121001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1100-1840-9931-8128

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Kewenangan : (KD)

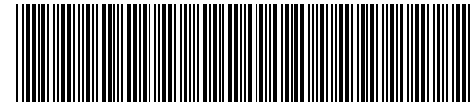
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	13.033.656	2.723.207	139.690	-	-	15.896.553		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.033.656	2.723.207	139.690	-	-	15.896.553		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	139.690	-	-	139.690		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	139.690	-	-	139.690	01 . 51	
01	RM	-	-	139.690	-	-	139.690	175@	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	13.033.656	2.723.207	-	-	-	15.756.863		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	13.033.656	2.722.907	-	-	-	15.756.563	01 . 51	
01	RM	13.033.656	2.722.907	-	-	-	15.756.563	175@	
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	300	-	-	-	300	01 . 51	
01	RM	-	300	-	-	-	300	175@	
<b>JUMLAH</b>		<b>13.033.656</b>	<b>2.723.207</b>	<b>139.690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.896.553</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Sugiyanto, S.H., M.H  
NIP. 196711241992121001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1100-1840-9931-8128

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526732	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.417.160	1.276.324	2.842.711	1.295.487	1.270.731	2.406.438	1.190.238	1.189.638	1.076.549	650.910	532.701	747.667	15.896.553
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.107.569	1.111.223	2.237.836	1.129.098	1.129.098	2.213.263	1.061.860	1.035.621	512.776	512.776	450.511	532.024	13.033.656
		<b>BELANJA BARANG</b>	219.990	165.100	604.875	166.389	141.633	193.175	78.378	154.017	563.773	138.134	82.190	215.553	2.723.207
		<b>BELANJA MODAL</b>	89.600	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	90	139.690
	005.01.WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	89.600	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	90	139.690
		53 BELANJA MODAL	89.600	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	90	139.690
	005.01.WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1.327.560	1.276.324	2.842.711	1.295.487	1.270.731	2.406.438	1.140.238	1.189.638	1.076.549	650.910	532.701	747.577	15.756.863
		51 BELANJA PEGAWAI	1.107.569	1.111.223	2.237.836	1.129.098	1.129.098	2.213.263	1.061.860	1.035.621	512.776	512.776	450.511	532.024	13.033.656
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	219.990	165.100	604.875	166.389	141.633	193.175	78.378	154.017	563.773	138.134	82.190	215.553	2.723.207

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Sugiyanto, S.H., M.H  
NIP. 196711241992121001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:1100-1840-9931-8128

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [526732] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>526732</b>	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.044.187	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 994.097		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.850
	53 Belanja Modal Rp. 50.090		Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025
<b>005.01.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
<b>1071</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</b>	522112	Belanja Langganan Telepon(RM)
<b>1071.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.969
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.090	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025	522113	Belanja Langganan Air(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000
<b>6986</b>	<b>Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama</b>		Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025
<b>6986.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)	522141	Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 117.505		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 347.314
	Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025		Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.674		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 109.852
	Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025		Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.760		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.000
	Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025		Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel(RM)	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 700		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.273
	Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025		Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:1100-1840-9931-8128

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [526732] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>6986.EBD</b>	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.400		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.500		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>		
521211 Belanja Bahan(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300			
Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.  
Sugiyanto, S.H., M.H  
NIP. 196711241992121001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:1100-1840-9931-8128

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [526732] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

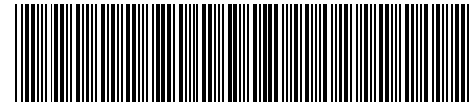
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

tt.  
Sugiyanto, S.H., M.H  
NIP. 196711241992121001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526733/2025**



DS:7440-7500-4352-1009

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 02**

Tanggal : 20 Maret 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Sebesar : Rp. 81.750.000 ( DELAPAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 81.750.000  
Rp. 81.750.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	81.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 81.750.000

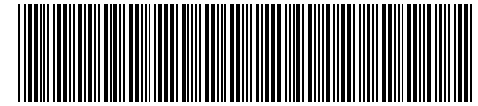
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7440-7500-4352-1009

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			81.750.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			81.750.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	30.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	30.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	2,00	Perkara, Berkas Perkara	1.060.000
Rincian Output	:	01	BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2,00	Perkara	1.060.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang	33.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	17.690.000
Rincian Output	:	01	QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1,00	Perkara	17.690.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

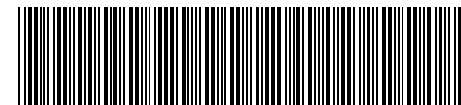
ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7440-7500-4352-1009

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : I B. 1

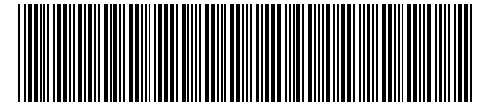
		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	81.750.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	81.750.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



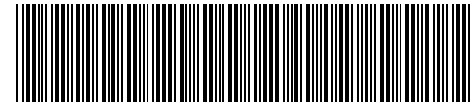
DS:7440-7500-4352-1009

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	-	81.750	-	-	-	81.750		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	81.750	-	-	-	81.750		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	81.750	-	-	-	81.750		
1059.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	30.000	-	-	-	30.000	01 . 51	
01	RM	-	30.000	-	-	-	30.000	175	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.060	-	-	-	1.060	01 . 51	
01	RM	-	1.060	-	-	-	1.060	175	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	33.000	-	-	-	33.000	01 . 51	
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000	175	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	17.690	-	-	-	17.690	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7440-7500-4352-1009

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Kewenangan : (KD)

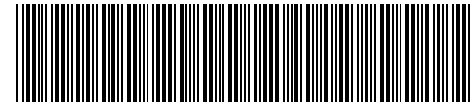
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	17.690	-	-	-	17.690	175	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>81.750</b>	-	-	-	<b>81.750</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7440-7500-4352-1009

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

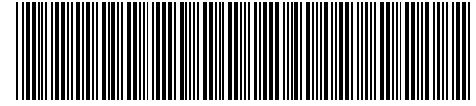
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526733	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	12.523	2.750	2.750	2.750	6.560	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	37.917	81.750
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	12.523	2.750	2.750	2.750	6.560	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	37.917	81.750
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	12.523	2.750	2.750	2.750	6.560	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	37.917	81.750
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	12.523	2.750	2.750	2.750	6.560	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	37.917	81.750
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.504	113.982
		- PNBP (425232)	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	131	1.550
		- PNBP (425233)	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.581	30.950
		- PNBP (425239)	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.792	81.482

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:7440-7500-4352-1009

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [526733] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

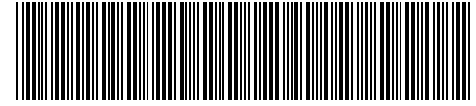
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:7440-7500-4352-1009

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [526733] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775